

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM ERA KLASIK (BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH)

Lisa Aminatul Mukaromah
Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
E-Mail : lisa@sunan-giri.ac.id

Abstrak

Pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw yang kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan khulafaur Rasyidin. Saat itulah Islam mulai memberi pengaruh kepada dunia, karena para khalifah sudah melakukan perluasan wilayah keluar daerah Arab. Setelah masa Khulafaur Rasyidin muncullah daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat saat kepemimpinan bani Umayyah dan Abbasiyah. Sehingga peradaban Islam memberi pengaruh yang besar ke pada dunia saat itu. Para sejarawan menyebut saat itu dengan "The Golden Age". Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, politik, pemerintahan, sains dan teknologi Termasuk di bidang Ekonomi. Berangkat dari uraian tersebut di atas, artikel ini akan membahas perkembangan ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dengan menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada masa Umayyah dan Abbasiyah mengalami kemajuan di beberapa bidang peradaban salah satunya adalah dalam bidang pemikiran ekonomi. Dinasti Abbasiyah menjadikan Islam sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan hal itu menjadi faktor berkembangnya perekonomian Islam pada masa itu. Dapat dikatakan bahwa, ada suatu kisah yang tak terhargai nilainya dari peninggalan sejarah Dinasti Abbasiyah. Hal ini harus menjadi motivasi untuk membangun visi umat dalam mengembangkan perekonomian dunia. Lebih dari 750 tahun, pemerintahan Islam berkibar sejak Bani Umayyah sampai Abbasiyah, dua system pemerintahan yang belum pernah ada tandingannya di dunia manapun hingga saat ini dan merupakan suatu masa yang panjang dan luas.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam, Klasik, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah.*

Pendahuluan

Kajian Ekonomi Islam sebagai studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw yang kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan khulafaur Rasyidin. Saat itulah Islam mulai memberi pengaruh kepada dunia, karena para khalifah sudah melakukan perluasan wilayah keluar daerah Arab. Setelah masa Khulafaur Rasyidin muncullah daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Berdasarkan catatan sejarah, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat saat kepemimpinan bani Umayyah dan Abbasiyah. Sehingga peradaban Islam memberi pengaruh

yang besar ke pada dunia saat itu. Para sejarawan menyebut saat itu dengan “*The Golden Age*”. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, politik dan pemerintahan, sains dan teknologi Termasuk di bidang Ekonomi. Berangkat dari uraian tersebut di atas, yang menyatakan bahwa pada masa Umayyah dan Abbasiyah mengalami kemajuan di beberapa bidang peradaban, maka di makalah ini akan disajikan sedikit tentang masa daulah Umayyah dan Abbasiyah yang menitik beratkan pada pemikiran-pemikiran ekonominya.

A. Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Umayyah

Pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan Bani Umayyah, sebuah pemerintahan yang diraih dengan berbagai cara “kudeta” dan menuai kontroversi hebat antara Ali dan Muawiyah.¹ Nama Bani Umayyah dalam Bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syams. Ia adalah salah satu pemimpin dalam Kabilah Suku Quraisy.²

Sejarahwan membagi dinasti Umayyah menjadi dua; pertama, Dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah Ibn Abu Sufyan yang berpusat di Damaskus (Syiria). Fase ini berlangsung sekitar satu abad dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khilafah menjadi sistem *mamkhalat* (kerajaan atau monarki) dan kedua, Dinasti Umayyah di Andalusia (Liberia) yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid ibn Abd al-Malik.³

1. Khalifah Muawiyah ibn Abu Sufyan

Muawiyah ibn Abu Sufyan bergelar Muawiyah I adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah. Muawiyah adalah seorang administrator dan negarawan. Muawiyah diakui oleh kalangan Sunni sebagai salah seorang sahabat Nabi, walaupun keislamannya baru dilakukan setelah *Fathu Makkah* (penaklukan Mekkah). Kalangan Syiah sampai saat ini tidak mengakui Muawiyah sebagai khalifah dan sahabat Nabi, karena dianggap telah menyimpang setelah meninggalnya Rasulullah saw. Ia diakui sebagai khalifah sejak Hasan ibn Ali, yang selama beberapa bulan menggantikan ayahnya sebagai khalifah, berbaiat kepadanya. Muawiyah melakukan

¹ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia) 2010, hlm. 111.

² Drs. Nur Chamid, M.M., *Op.cit.*, hlm. 105.

³ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah., *Op.cit.*, hlm. 111

kudeta dengan pihak Ali bin Abi Thalib sehingga terjadi Perang Shiffin yang memperkokoh posisi Muawiyah dan melemahkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.⁴ Muawiyah dinobatkan sebagai khalifah di Iliya (Yerusalem) pada 40H / 660M. Dengan penobatannya itu, ibukota Provinsi Suriah, Damaskus, berubah menjadi ibukota Kerajaan Islam.⁵

Perintisan Dinasti Umayyah dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak membaiat Ali, berperang melawan Ali dan melakukan perdamaian (*tahkim*) dengan pihak Ali yang secara politik sangat menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. Jabatan khalifah setelah Ali bin Abi Thalib wafat dipegang oleh putranya, Hasan ibn Ali selama beberapa bulan. Akan tetapi karena tidak didukung oleh pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat, akhirnya Muawiyah melakukan perjanjian dengan Hasan ibn Ali.⁶

Pada masa pemerintahannya, beliau mendirikan dinas pos beserta dengan fasilitasnya, menerbitkan angkatan perang, mencetak uang dan mengembangkan jabatan hakim sebagai jabatan profesional. Selain itu, Muawiyah juga menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik.

Selain terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, pada masa Bani Umayyah juga terdapat perubahan lain, misalnya masalah *Baitul Maal*. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, *Baitul Maal* berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi sejak pemerintahan Muawiyah ibn Abu Sufyan, *Baitul Maal* beralih kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga raja.⁷

Khalifah Muawiyah mendirikan suatu pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Muawiyah bahkan mampu mendirikan sebuah istana yang megah bernama *Al-Khadhra* (yang hijau) yang arsiteknya adalah Muawiyah sendiri, pendiri dinasti. Istana itu berdiri berdampingan dengan Masjid Umayyah yang kemudian dihiasi dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

⁵ Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (New York: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm.235-236.

⁶ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 112.

⁷ Drs. Nur Chamid M.M., *Op.cit.*, hlm. 109

direnovasi oleh Al-Walid.⁸Situasi ketika Muawiyah menjadi penguasa mengandung banyak kesulitan. Pemerintahan imperium disentralisasikan serta munculnya anarkisme dan ketidakdisiplinan kaum *nomad* yang tidak lagi dikendalikan oleh ikatan agama dan moral menyebabkan ketidakstabilan dan kehilangan kesatuan. Muawiyah mengubah kedaulatan agama menjadi negara sekuler, namun unsur agama di dalam pemerintah dan pemerintahan tidak hilang sama sekali. Dia mematuhi formalitas agama yang terkadang menunjukkan dirinya sebagai seorang pejuang Islam.⁹

Muawiyah melaksanakan perubahan-perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahan negeri, dasar pemerintahannya terdapat dalam angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Muawiyah berusaha mendirikan pemerintahan yang stabil menurut garis-garis pemerintahan Bizantium.

Muawiyah merupakan orang pertama dalam Islam yang mendirikan suatu departemen pencatatan. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin di dalam suatu register, kemudian yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Sebelumnya, yang dikirimkan adalah surat perintah-perintah terbuka. Pernah terjadi, khalifah memberikan 1.000 dirham kepada seseorang dari perbendaharaan provinsi. Surat yang berisi perintah itu dicegat saat perjalanan dan jumlahnya diubah dengan angka yang lebih tinggi. Pelayanan pos kabarnya telah diperkenalkan oleh Muawiyah. Kemudian kepala pos memberi tahu pemerintah pusat tentang apa yang terjadi pada pemerintahan provinsi. Dengan cara ini, Muawiyah melaksanakan kekuasaan pemerintah pusat dengan membentuk dua sekretariat provinsi yang menggunakan Bahasa

Yunani dan Bahasa Persia. Sebagai seorang administrator yang berpandangan jauh, Muawiyah memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan. Dia mengangkat seorang gubernur disetiap provinsi untuk melaksanakan pemerintahan. Akan tetapi, dia mengangkat seorang pejabat khusus dengan gelar *shahibul-kharaj*. Pejabat ini tidak terikat dengan gubernur dan dia diangkat oleh khalifah. Dalam masalah keuangan, gubernur harus menggantungkan dirinya pada *shahibul-kharaj* dan hal ini membatasi kekuasaannya.

Muawiyah meninggal dunia pada tahun 680M. Secara keseluruhan, setelah

⁸ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 121.

⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

memerintah imperium Islam selama kira-kira 20 tahun, masa pemerintahan Muawiyah merupakan masa kemakmuran dan perdamaian di dalam negeri serta keberhasilan di luar negeri.¹⁰

2. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan

Marwan, pendiri Dinasti Umayyah dari keluarga Marwan, digantikan oleh anaknya, Abdul Malik ibn Marwan. Dibawah kepemimpinan Abdul Malik dan keempat anaknya yang kemudian meneruskan kekuasaannya, Dinasti Umayyah di Damaskus mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Pada masa kejayaan tersebut terjadi penaklukan Transoxiana, penaklukan kembali dan pengendalian keamanan di Afrika Utara dan penaklukan daerah Eropa- sebuah upaya terbesar yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab, yaitu penaklukan Spanyol.

Masa-masa itu juga ditandai proses nasionalisasi atau arabisasi dalam bidang administrasi, pembuatan keping Mata Uang Arab pertama, pembentukan layanan pos dan pembangunan berbagai monumen, termasuk Kubah Batu di Yerusalem- tempat suci ketiga dalam Islam.¹¹ Arabisasi kerajaan dibawah kepemimpinan Abdul Malik meliputi perubahan bahasa yang digunakan dalam catatan administrasi publik (*diwan*) dari Bahasa Yunani ke dalam Bahasa Arab di Damaskus dan dari Bahasa Persia ke dalam Bahasa Arab di Irak dan provinsi bagian timur, serta penerbitan Uang Logam Arab. Perubahan bahasa secara otomatis menyebabkan perubahan struktur kepegawaian. Di Suriah, para penakluk terdahulu, yang merupakan keturunan murni padang pasir yang tidak mengenal tata buku dan keuangan, harus bersedia menyerahkan jabatan keuangan kepada pegawai yang mampu menulis dalam Bahasa Yunani, sementara di Irak dan Persia, jabatan tersebut diserahkan kepada orang yang mampu menulis Bahasa Persia.¹²

Pada masa pra-Islam, Uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz, disamping beberapa uang perak Himyar. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa Abdul Malik, tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari Mata Uang Bizantium dan Persia. Pada 695M, Abdul Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab.

Disamping membuat uang emas Islam dan melakukan arabisasi administrasi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 114-115.

¹¹ Phillip K. Hitti, *Op.cit.*, hlm. 255.

¹² *Ibid.*, hlm. 270-271

kerajaan, Abdul Malik juga mengembangkan sistem layanan pos, dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibukota-ibukota provinsi lainnya. Layanan itu dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan transportasi para pejabat pemerintah dan persoalan surat- menyurat. Semua kepala pos bertugas untuk mencatat dan mengirimkan kepada khalifah semua peristiwa penting yang terjadi di wilayah mereka masing-masing.¹³

Diantara prestasi menonjol pada masa ini adalah banyaknya monumen arsitektural, yang beberapa diantaranya bertahan hingga sekarang. Di Palestina terdapat sebuah kota bernama al-Ramlah dan Menara Masjid Putih (terbesar ketiga di Suriah setelah Masjid Umayyah di Damaskus dan Kubah Batu di Yerusalem) yang dibangun kembali masih tetap berdiri.¹⁴

3. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

Selama masa pemerintahannya, Umar ibn Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Berbagai pembenahan dilakukannya diseluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Langkah ini dimulai dari dirinya sendiri. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui *Baitul Maal*, mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berada di Yamamah, Mukaedes, Jabal al- Wars, Yaman dan Fadak, hingga cincin berlian pemberian al-Walid. Selama berkuasa, ia juga tidak mengambil sesuatupun dari *Baitul Maal*, termasuk pendapatan yang telah menjadi haknya.

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnya, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambahkan perluasan wilayah. Dalam rangka ini pula, ia menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain.

Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Umar bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak

¹³ *Ibid.*, hlm. 272.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 275.

terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musafir dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat.

Salah satu bukti kesungguhannya dalam menegakkan keadilan, Umar pernah membelanjakan seluruh kekayaan *Baitul Maal* di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan *Baitul Maal* di Syam.¹⁵ Khalifah Umar berupaya untuk membersihkan *Baitul Maal* dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para *amir* bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Disamping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun ke *Baitul Maal*. Harta tersebut diperoleh dari warisan ayahnya.¹⁶

Khalifah Umar juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku pada tiga profesi, yaitu pedagang, petani dan tuan tanah.¹⁷ Umar jugamenetapkan kebijakan dengan mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping. Kebijakan ini dikeluarkan karena ternyata masyarakat Bani Najran kebanyakan bukan orang-orang kaya dan mereka merasa keberatan untuk memikul. Karena itu, mereka menuntut Umar untuk mengurangi beban pajak tersebut. Permintaan ini kemudian dipenuhi oleh Umar namun Umar mewajibkan pembayaran *jizyah* (pajak jiwa) kepada non Muslim dan memberlakukan *kharaj* (pajak tanah) kepada umat Muslim. Karena sebagian besar umat muslim adalah orang-orang kaya dan mampu membayar pajak sedangkan umat non-muslim telah mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam.¹⁸

¹⁵ Dr. Euis Amalia, M.Ag., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Depok: Gratama Publishing, 2010) hlm. 102-103.

¹⁶ Drs. Nur Chamid, M.M., *Op.cit.*, hlm. 114.

¹⁷ Dr. Euis Amalia, *Op.cit.*, hlm. 103

¹⁸ Drs. Nur Chamid, M.M., *Op.cit.*, hlm. 115.

Dalam bidang pertanian, Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasa lahan. Ia memerintahkan amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pertanian yang ada. Dalam menetapkan sewa tanah, Umar menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati. Ia melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur dan jika tanah tersebut subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.

Lebih jauh, Umar menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya.

Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Jika terdapat *surplus*, Umar menyarankan agar wilayah tersebut memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini, ia mengangkat ibn Jahdam sebagai *amil shadaqah* yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil shadaqah secara merata ke seluruh wilayah Islam.

Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, Umar menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Baginya, hak seorang yang telah meninggal dunia tidak akan hilang karena akan tetap diberikan kepada ahli warisnya. Begitu pula hak para tahanan. Hal ini berlaku secara universal, tanpa membeda-bedakan agama dan yang lainnya. Ia juga mendirikan rumah makan khusus untuk para fakir miskin. Umar juga mengeluarkan kebijakan pembukaan jalur perdagangan bebas, baik darat maupun udara, sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian (pajak ini di awal pemerintahan Umar ditiadakan karena situasi ekonomi yang belum kondusif, setelah stabilitas ekonomi masyarakat membaik, pajak ini diterapkan) dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.

Setelah masa pemerintahan Umar, kekuasaan Bani Umayyah berada ditangan Yazid ibn Abdul Malik. Pada masa ini, kekacauan dalam kehidupan masyarakat muncul kembali. Hal ini dipicu oleh kegandrungan khalifah dan para penggantinya terhadap kemewahan dan ketidakpeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat. Kondisi *baitul maal* yang telah dikembalikan oleh Umar kepada posisi yang

sebenarnya tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan posisi tersebut dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kerusuhan tersebut terus berlanjut hingga semakin memperkuat posisi kaum oposisi dan sebaliknya, memperlemah posisi sang khalifah. Akhirnya, pihak oposisi berhasil menumbangkan Dinasti Bani Umayyah.¹⁹

B. Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Abbasiyah

Kekuasaan Dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan Dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa Dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 H. Dia dilantik menjadi Khalifah pada tanggal 3 Rabiul awwal 132 H. Kekuasaan Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750-1258 M.²⁰

Selama Dinasti Abbasiyah berdiri pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada lima periode:²¹

1. Masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya Dinasti Abbasiyah tahun 132 H/750 M sampai meninggalnya *khalifah* Al-Watsiq 232 H/847 M. Masa ini disebut periode pengaruh Persia Pertama.
2. Masa Abbasiyah II, yaitu mulai *khalifah* Al-Mutawakkil pada tahun 232 H/847 M sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad tahun 334 H/946 M. Masa ini disebut periode pengaruh Turki pertama.
3. Masa Abbasiyah III, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 H/946 M. Masa ini disebut periode pengaruh Persia kedua.
4. Masa Abbasiyah IV, yaitu masuknya kaum saljuk di Baghdad tahun 447 H/1055 M, disebut periode pengaruh Turki kedua.
5. Masa Abbasiyah V, sampai jatuhnya Baghdad ketangan bangsa Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 H/1258 M. Pada masa ini khalifah bebas dari pengaruh Dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad.

¹⁹ Dr. Euis Amalia, M.Ag., *Op.cit.*, hlm. 104.

²⁰ Dr. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2012, hal. 69-70.

²¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.123.

Dinasti Abbasiyah pada periode pertama ini, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul- betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang.²²

C. Silsilah Kepemimpinan Dinasti Abbasiyah

Selama lebih kurang dari lima setengah abad (132-656 H/750-1258 M), masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, dinasti ini mempunyai 37 orang khalifah, mulai dari masa pemerintahan Abdul Abbas al-Saffah (132 H/750 M) hingga masa pemerintahan al-Musta'shim (656 H/1258 M). Berikut ini silsilah dinasti Bani Abbasiyah yang berkuasa.

1.	Abul Abbas al-Saffah	132 - 136 H/ 750 - 754 M
2.	Abu Ja'far al-Mansur	136 – 158 H/ 754 - 755 M
3.	Al- Mahdi	158 – 169 H/ 775 - 785 M
4.	Musa al- Hadi	169 – 170 H/ 785 – 786 M
5.	Harun al- Rasyid	170 – 193 H/ 786 – 809 M
6.	Al- Amin	193 – 198 H/ 809 - 813 M
7.	Abdullah al- Makmun	198 – 218 H / 813 – 833 M
8.	Abdullah al- Makmun	198 – 218 H / 813 – 833 M
9.	Abdullah al- Makmun	198 – 218 H / 813 – 833 M
10.	Abdullah al- Makmun	198 – 218 H / 813 – 833 M
11.	Al- Mu'tashim Billah	218 – 227 H/ 833 – 842 M
12.	Al- Watsiq	227 – 232 H / 842 – 847 M
13.	Al- Mutawakkil	232 – 247 H / 847 – 861 M
14.	Al- Muntashir	247 – 248 H / 861 – 862 M
15.	Al- Musta'in	248 – 252 H / 862 – 866 M
16.	Al- Mu'taz	252 – 255 H / 866 – 869 M
17.	Al- Muhtadi	255 – 256 H / 869 – 870 M
18.	Al- Mu'tamid	256 – 279 H / 870 – 892 M

²² Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam : Imperium Turki Usmani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), hal. 2.

19.	Al- Mu'tadhid	279 – 289 H / 892 – 902 M
20.	Al- Muktafi	289 – 295 H / 902 – 908 M
21.	Al- Muqtadir	295 - 320 H / 908 – 932 M
22.	Al- Qahir	320 – 322 H / 932 – 934 M
23.	Al- Radhi	322 – 329H / 934 – 940 M
24.	Al- Muttaqi	329 – 333 H / 940 – 944 M
25.	Al- Mustakfi	333 - 334 H / 944 – 946 M
26.	Al- Mutha'i	334 – 363 H / 946 – 974 M
27.	Al- Tha'i	363 – 381 H / 974 – 991 M
28.	Al- Qadir	381 – 422 H / 991 – 1031 M
29.	Al- Qayyim	422 – 467 H / 1031 – 1075 M
30.	Al- Muqtadi	467 – 487 H / 1075 – 1094 M
31.	Al- Mustazhir	487 – 512 H / 1094 – 1118 M
32.	Al- Musytarsyid	512 – 529 H/ 1118 – 1135 M
33.	Al- Rasyid	529 - 530 H / 1135 – 1136 M
34.	Al- Muktafi	530 - 555 H / 1136 - 1160 M
35.	Al- Mustanjid	555 – 566 H / 1160 – 1170 M
36.	Al- Mustadhi	566 – 575 H / 1170 - 1180 M
37.	Al- Nashir	575 – 622 H / 1180 - 1225 M
38.	Al- Zahir	622 – 623 H / 1225 – 1226 M
39.	Al- Mustanshir	623 – 640 H / 1226 - 1242 M
40. .	Al-Musta'shim	640 – 656 H / 1242 - 1258 M

Dari sekian khalifah, paling tidak terdapat 3 (tiga) orang khalifah yang sangat terkenal. Mereka adalah Abu Ja'far al-Mansur (136 – 158 H/ 754 -755 M), Harun al-Rasyid (170–193 H/ 786– 809 M), dan Abdullah al- Makmun (198–218 H /813–833 M). Pada masa mereka inilah peradaban Islam mengalami kejayaan.

D. Perkembangan Ekonomi Dinasti Abbasiyah

Perkembangan peradaban Islam terjadi pada banyak sektor terutama pada periode awal Dinasti Abbasiyah. Upaya ke arah kemajuan ini sebenarnya sudah mulai sejak masa pemerintah al-Mansur. Yaitu dengan dipinangkannya pusat pemerintahan ke Baghdad tiga tahun setelah dia dilantik menjadi *khalifah*. Dijadikannya kota Baghdad sebagai pusat

kendali pemerintahan itu mempunyai arti tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi. Baghdad merupakan sebuah kota yang terletak di daerah yang sangat strategis bagi perniagaan dan perdagangan. Sungai Tigris bisa dilayari sampai kota ini. Begitu juga terdapat jalur pelayaran ke sungai Eufrat yang cukup dekat, sehingga barang-barang perdagangan dan perniagaan dapat diangkut mengalir menghilir sungai Eufrat dan Tigris dengan menggunakan perahu- perahu kecil. Di samping itu, yang terpenting adalah terdapatnya jalan nyaman dan aman dari semua jurusan.

Baghdad akhirnya menjadi daerah yang sangat ramai karena di samping sebagai ibukota kerajaan juga sebagai kota niaga yang cukup marak pada masa itu. Dari situlah negara akan dapat devisa yang sangat besar jumlahnya Berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Dinasti Abbasiyah, diiringi pula dengan bertambahnya jumlah penduduk , yang di mana semakin pesat pertumbuhan penduduk maka semakin besar dan banyak pula faktor permintaan pasar (*demand*). Hal ini pada gilirannya memicu produktivitas ekonomi yang tinggi.

Adapun perkembangan dar sector industry dimana banyak berdiri kota- kota industri, seerti Bashrah yang terkenal dengan industri sabun dan gelasnya, Kufah dengan industri suteraanya, Mesir dengan industri tekstilnya, Andalusia dengan industri kapal, kulit, dan senjatanya. Berkenaan dengan industri di Baghdad ini, bahwa Baghdad mempunyai 400 buah kincir air, 4.000 pabrik gelas dan 30.000 kilang keramik.²³

Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun al-Rasyid (786-809 M) dan putranya al-Ma'mun (813-833 M). Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidagn seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesusastraan dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang-bidang tadi mencapai puncak keemasannya.

E. Kebijakan Fiskal dan Moneter Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Beberapa khalifah yang pernah memimpin pada masa Dinasti Abbasiyah dan sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Islam adalah sebagai berikut:

²³ Abdillah Mundir, dkk, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), hal. 196.

1. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur (137-158 H/753-744 M)²⁴

Abu Ja'far Al-Mansur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah menggantikan saudaranya Abdul Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur membangun kota Baghdad menjadi pusat pemerintahan dan meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Oleh sebab itu, tidak pernah terjadi defisit anggaran besar-besaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang keluar. Jalur-jalur administrasi pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah ditata dengan rapi sehingga sistem dan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Kebijakannya ini menimbulkan dampak yang positif di kalangan para pejabat pemerintahan, karena terjadi koordinasi dan kerja sama yang baik di antara mereka. Koordinasi dan kerja sama itu terjadi antara Kepala *Qadhi* (Jaksa Agung), Kepala Polisi Rahasia, Kepala Jawatan Pajak, dan Kepala Jawatan Pos. Hal itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang tidak adil dengan memberikan hak-hak masyarakat.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur adalah menetapkan intervensi harga pada saat terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Sumber pendapatan berasal dari zakat, kharaj, dan jizyah. Pengeluaran negara meliputi biaya administrasi pemerintahan, gaji pegawai negara, memperkokoh angkatan militer. Sedangkan untuk kebijakan moneter, khalifah Abu Ja'far Al-Mansur melanjutkan pendahulunya Al-Saffah yaitu mencetak dinar dengan mengikuti model dinar Umayyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukiran-ukiran dan ukuran dirhamnya berkurang.

Pada awal pemerintah beliau, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya, al-saffah, banyak menggunakan dana baitul maal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Hal tersebut mendorong khalifah al-mansur untuk bersiap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan.

Dalam mengendalikan harga-harga, khalifah Al-Mansur memerintahkan

²⁴ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 150.

para kepada jawatan pos untuk melaporkan harga pasaran dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Jika mengalami kenaikan yang luar biasa, ia memerintahkan para walinya agar menurunkan harga- harga ke tingkat semula. di samping itu, khalifah al-manshur sangat hemat dalam membelanjakan harta baitul maal. Ketika ia meninggal, kekayaan kas negara telah mencapai 810 juta dirham.

Tentang bagaimana kecakapan rasyid memasukan uang ke dalam kas negara (bait al-maal), pernah diberitakan orang, bahwa apabila sedang tidur terlentang memandang awan lalu di angkasa raya, lantas beliau berkata :’’oh awan, engkau boleh melayang kemana saja, pajakmu pasti akan datang kepada ku!’’.

Sebabnya maka kas negara demikian kaya nya pada permulaan Daulah Abbasiyyah. Yaitu karena para khalifah betul-betul memandang soal ekonomi dan keuangan negara sangat penting, sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi dia pandang soal yang paling penting. Baik khalifah manshur atau khalifah-khalifah sesudahnya telah membangun ekonomi negara dengan berhasil sekali, baik dalam bidang pertanian, perindustrian ataupun dalam bidang perdagangan.

2. Khalifah Harun Al-Rasyid (170-193 H/786-808 M)²⁵

Ketika pemerintahan dikuasai Khalifah Harun Al-Rasyid, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya, khalifah melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun baitul mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa Diwan, yaitu:

- a. Diwan al-khazanah: bertugas mengurus seluruh perbendaharaan Negara.
- b. Diwan al azra: bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi.
- c. Diwan khazain as-siaah: bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang.

Sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini adalah *kharaj*, *jizyah*, zakat, *fa'i*, *ghanimah*, *usyr*, dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris.Seluruh pendapatan negara tersebut dimasukkan ke dalam baitul mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan. Pemerintahan

²⁵ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi...*,hal. 176.

khalifah Harun Al- Rasyid juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk *Qadi* Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah. Untuk itu, Imam Abu Yusuf menyusun sebuah kitab yang diberi judul Kitab al-Kharaj Dalam pemungutan al-*Kharaj*, para Khalifah Abbasiyah melakukan dengan tiga cara, yaitu:

- Al-Muhasabah atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
- Al-Muqasamah atau penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh.
- Al-Maqhatha'ah atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.

Pendapatan Negara dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dan dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemahan buku-buku Yunani, disamping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Untuk melindungi integritas uang logam dan kepercayaan umum, Harun ar- Rasyid membangun kantor inspektur uang logam (*nazir as-Sikkah*) sehingga standar dinar sangat tinggi kualitasnya.

Khalifah Harun al-Rasyid meninggalkan kekayaan negara dalam kas waktu beliau meninggal sebanyak lebih dari 900.000 dirham. Kecakapan rasyid dalam mengemukakan kas negara sama dengan kecakapan manshur, hanya rasyid lebih banyak mengeluarkan di bandingkan dengan manshur, mungkin karena zaman yang berbeda.

KESIMPULAN

Pasca Pemerintahan Khulafaur Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru yang dikenal dengan Bani Umayyah, sebuah Pemerintahan Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin berubah menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun-temurun).

Selama masa pemerintahan dinasti ini, telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memacu timbulnya hasrat sebagian besar Khalifah Bani Umayyah untuk memanfaatkan kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri dan keluarganya.

Baitul Maal yang merupakan kantor perbendaharaan umat seakan menjadi milik

pribadi para pangeran. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, terdapat dua macam *baitul maal*; umum dan khusus. Pendapatan *baitul maal* umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan pendapatan *baitul maal* khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. Dengan demikian, telah terjadi disfungsi penggunaan dana *baitul maal* pada masa pemerintahan Daulah Umayyah.

Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 H/750 M oleh Abul Abbas Ash-shaffah, dan sekaligus sebagai *khalifah* pertama. Kekuasaan Bani Abbasiyah melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu lima abad dimulai dari tahun 132-656 H/750-1258 M. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh bani Hasyim (*alawiyun*) setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya.

Dinasti Abbasiyah menjadikan Islam sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan hal itu menjadi faktor berkembangnya perekonomian Islam pada masa itu. Dapat dikatakan bahwa, ada suatu kisah yang tak terharga nilainya dari peninggalan sejarah Dinasti Abbasiyah. Hal ini harus menjadi motivasi untuk membangun visi umat dalam mengembangkan perekonomian dunia.

Lebih dari 750 tahun, pemerintahan Islam berkibar sejak Bani Umayyah sampai Abbasiyah, dua system pemerintahan yang belum pernah adaandingannya di dunia manapun hingga saat inidan merupakan suatu masa yang panjang dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia) 2010.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Depok: Gratama Publishing, 2010.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chapra, Umar. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. New York: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Mundir, Abdillah dkk. *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Surabaya: Kopertais IV Press, 2015.

Susmihara & Rahmat. *Sejarah Islam Klasik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Syalabi, Ahmad. *Sejarah Kebudayaan Islam : Imperium Turki Usmani*. Jakarta: Kalam Mulia, 1988.

Yatim, Dr. Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.